

**MANAJEMEN KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH (TPID) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DALAM MENGENDALIKAN INFLASI
DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh

MEDA FITRIA
NIM. 140 212 0381

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1440 H / 2018 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : MANAJEMEN KERJA TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH (TPID) PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DALAM
MENGENDALIKAN INFLASI DI KOTA
PALANGKA RAYA

NAMA : MEDA FITRIA

NIM : 140 212 0381

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (1)

Palangka Raya, Oktober 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Enriko Tedja Sukmana, MSI
NIP. 19840321 201101 1 012

Pembimbing II

Fuad Muhajirin Farid, S.Pd, M.Si
NIK. 19880711 201609 25 22

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dra. Hj. Rahmawati, M.Si
NIP. 19540630 198103 2 001

Plt. Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Ali Sadikin, M.Si
NIP. 19740201 199903 1 002

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Meda Fitria

Palangka Raya, Oktober 2018

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari:

Nama : **MEDA FITRIA**

Nim : **140 212 0381**

Judul : **MANAJEMEN KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI**
DAERAH (TPID) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI KOTA
PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Enriko Teja Sukmana, MSI
NIP. 19840321 201101 1 012

Pembimbing II


Fuad Muhajirin Farid, S.Pd, M.Si
NIK. 19880711 201609 25 22

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **MANAJEMEN KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh Meda Fitria NIM : 1402120381 telah *dimunagasyahkan* Tim *Munagasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Oktober 2018

Palangka Raya, Oktober 2018

1. Ali Sadikin, M.Si
Penguji/Ketua Sidang
2. M. Zainal Arifin, M. Hum
Penguji I
3. Enriko Tedja Sukmana, MSI
Penguji II
4. Fuad Muhajirin Farid, M.Si
Penguji/Sekretaris

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

(.....)
Dra. Hj. Rahmawati, M.Si
NIP. 19540630 198103 2 001

**MANAJEMEN KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MENGENDALIKAN
INFLASI DI KOTA PALANGKA RAYA**

ABSTRAK
Oleh MEDA FITRIA

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia melainkan juga dari sisi penawaran. Maka dari itu pengelolaan inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dilevel pusat sejak tahun 2005, penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tahun 2008. Untuk mengendalikan dan menekan laju inflasi, perlu dilakukan langkah-langkah strategis melalui kerjasama kelembagaan daerah dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah yang nantinya bertugas menjaga inflasi Kalimantan Tengah yang saat ini diwakili oleh Kota Palangka Raya dan Sampit. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen kerja yang diterapkan oleh TPID Kalteng dalam mengendalikan inflasi. Beranjak dari rumusan masalah yaitu Bagaimana manajemen kerja TPID Provinsi Kalteng dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sekretaris dan anggota TPID Provinsi Kalimantan Tengah. Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang diabsahkan menggunakan triangulasi sumber dan kemudian dianalisis melalui tahapan *reduction*, *display* dan *conclusions*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kerja TPID Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan pedoman pengendalian inflasi yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015. Secara tidak langsung TPID Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen, karena proses pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalteng sudah sejalan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Manajemen pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalteng sudah cukup berhasil membuat angka inflasi Kalteng dan Palangka Raya relatif terkendali dan stabil, karena itu penulis menyimpulkan bahwa manajemen pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalteng cukup efektif dengan kontribusi yang berhasil mereka capai sebagaimana tujuan dari TPID.

Kata Kunci: Manajemen Kerja, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Inflasi

**THE WORK MANAGEMENT OF REGIONAL INFLATION CONTROL
TEAM (TPID) OF CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE ON
CONTROLLING INFLATION IN PALANGKA RAYA CITY**

ABSTRACT
By MEDA FITRIA

The low and stable inflation is a recondition to reach a society welfare. In the other hand, the source of inflation in Indonesia not only comes from the government that can be controlled by Bank Indonesia, but also from the demand side. So, the inflation manager needs a cooperation and coordination across instances, that is Bank Indonesia and government. The government and Bank Indonesia transformed an inflation monitor and control team at the central level on 2005, the strengthening coordination is continued by establishing the regional inflation control team (TPID) on 2008. In order to control and reduce the inflation, it is needed to have a strategic plans through a cooperation of regional institution by establishing the regional inflation control team (TPID) of Central Kalimantan Province in which it will work to maintain the inflation in Central Kalimantan which is represented by Palangka Raya City and Sampit now. So, this research aims to know how is the work management that is implemented by TPID Kalteng on controlling the inflation. According to research hypothesis, how is the work management of TPID Kalteng on controlling the work management in Palangka Raya City?.

This research is filed research which uses a quantitative descriptive approach. The research subjects of this research are the secretary and TPID member of Central Kalimantan Province. The data from this research is collected by observation, interview, and documentation technique which is validated by using triangulation source, then it is analysed through reduction, display, and conclusions stages.

The research shows that work management of TPID Kalteng on controlling inflation is based on the inflation control guidance which set through governor regulations number 10 year 2015. TPID Kalteng has been implemented management functions indirectly, because the inflation control process that is done by TPID Kalteng has been in line with planning, organising, implementing and controlling function. The management of inflation control which is done by TPID Kalteng has been successfully enough in which the inflation in Kalteng and Palangka Raya is relatively controlled and stable. Thus, the researcher conclude that the management of inflation control that is done by TPID Kalteng is effective enough with the contribution that they managed to achieve as like as TPID goals.

Key Words: Work Management, Regional Inflation Control Team, Inflation

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MANAJEMEN KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI KOTA PALANGKA RAYA”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumil qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH. selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak M. Zainal Arifin, M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik selama menjalani perkuliahan.

5. Bapak Enriko Tedja Sukmana, MSI. dan Bapak Fuad Muhajirin Farid, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang dengan ikhlas bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Biro Organisasi dan Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta SKPD terkait yang dengan ikhlas bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data kepada penulis mengenai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Seluruh teman-teman Mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2014 khususnya Kelas C yang telah membantu penulis selama penelitian.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Oktober 2018

Penulis

Meda Fitria
NIM. 1402120381

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul
"MANAJEMEN KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
(TPID) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM
MENGENDALIKAN INFLASI DI KOTA PALANGKA RAYA" benar karya
ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara
yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap
menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2018

Penulis



Meda Fitria
NIM. 1402120381

MOTTO

إِنَّ لِلَّهِ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ

“Sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”
(HR. Thabrani)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT. dengan kerendahan hati penulis karya ini saya

persembahkan kepada

1. Ibunda tercinta Fatimah dan Ayahnda tercinta Pandi, yang selalu memberikan doa restu, serta dukungan baik moril maupun materil;
2. Kakak dan Adik tersayang Dini Amelia dan Noviani Rezky yang selalu mendukung, dan mengingatkan agar jangan melalaikan studi;
3. Seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi;
4. Semua dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah selalu menginspirasi sehingga menjadi seseorang yang selalu berusaha menjadi lebih baik dan memberikan wawasan selama menjalani perkuliahan;
5. Sahabat-sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk saling memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan sehingga dapat membangkitkan semangat untuk segera menyelesaikan studi ini;
6. Teman-teman seperjuangan ESY 2014 khususnya kelas C dengan semua kenangan yang kita ukir selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya, semoga semua ini menjadikan kita sebuah keluarga dan selalu terjalin silaturahmi diantara kita semua. Amin;
7. Untuk kampus tercinta IAIN Palangka Raya, terimakasih.

DAFTAR ISI

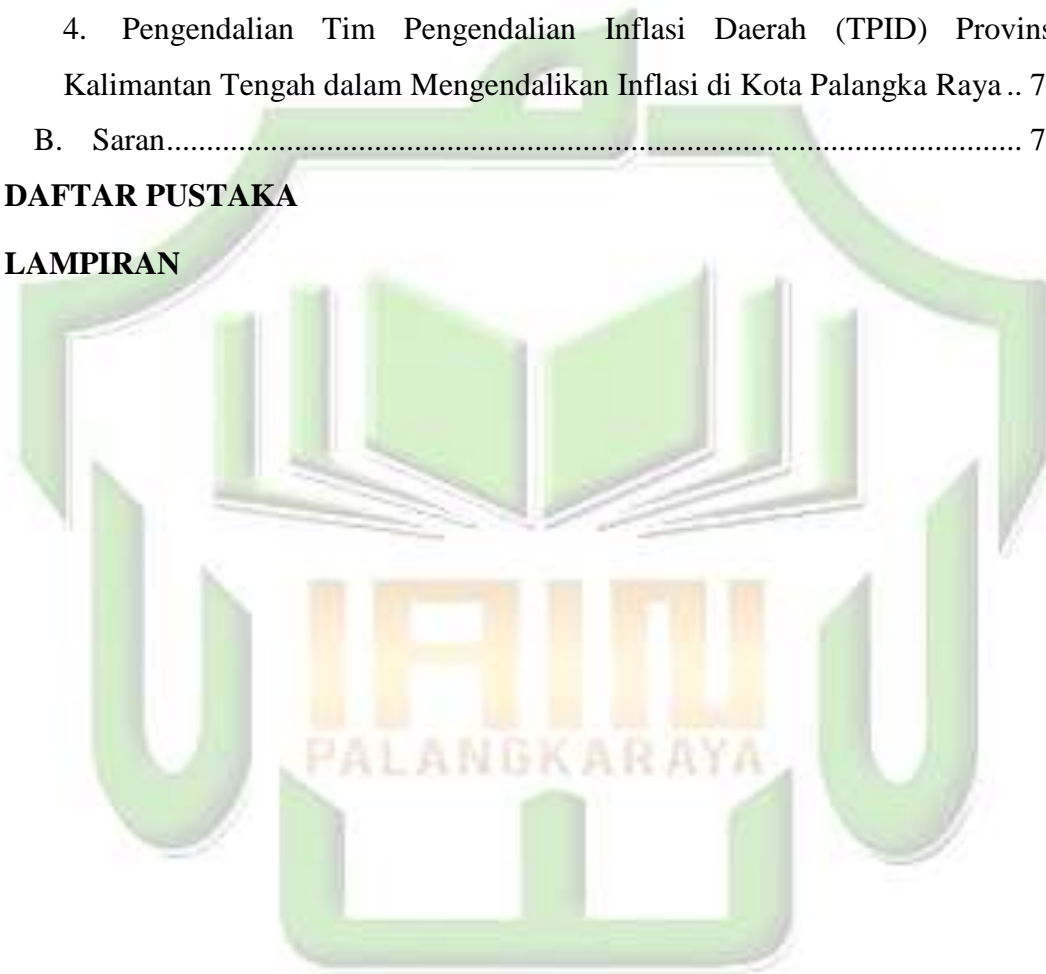
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teoritis.....	13
1. Manajemen Kerja	13
2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	18
3. Inflasi.....	22

C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	36
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
C. Objek dan Subjek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Observasi	38
2. Wawancara	39
3. Dokumentasi.....	40
E. Pengabsahan Data	41
1. Triangulasi Sumber	41
2. Triangulasi Metode.....	42
3. Triangulasi Penyidik.....	42
4. Triangulasi Teori	42
F. Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sekilas Mengenai Lokasi Penelitian	44
B. Gambaran Umum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah	45
C. Manajemen Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya.....	46
1. Perencanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya ..	48
2. Pengorganisasian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi.....	51
3. Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi.....	55
4. Pengendalian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi.....	65
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	71
1. Perencanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya ..	71
2. Pengorganisasian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya ..	72
3. Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya ..	72
4. Pengendalian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya ..	73
B. Saran.....	73

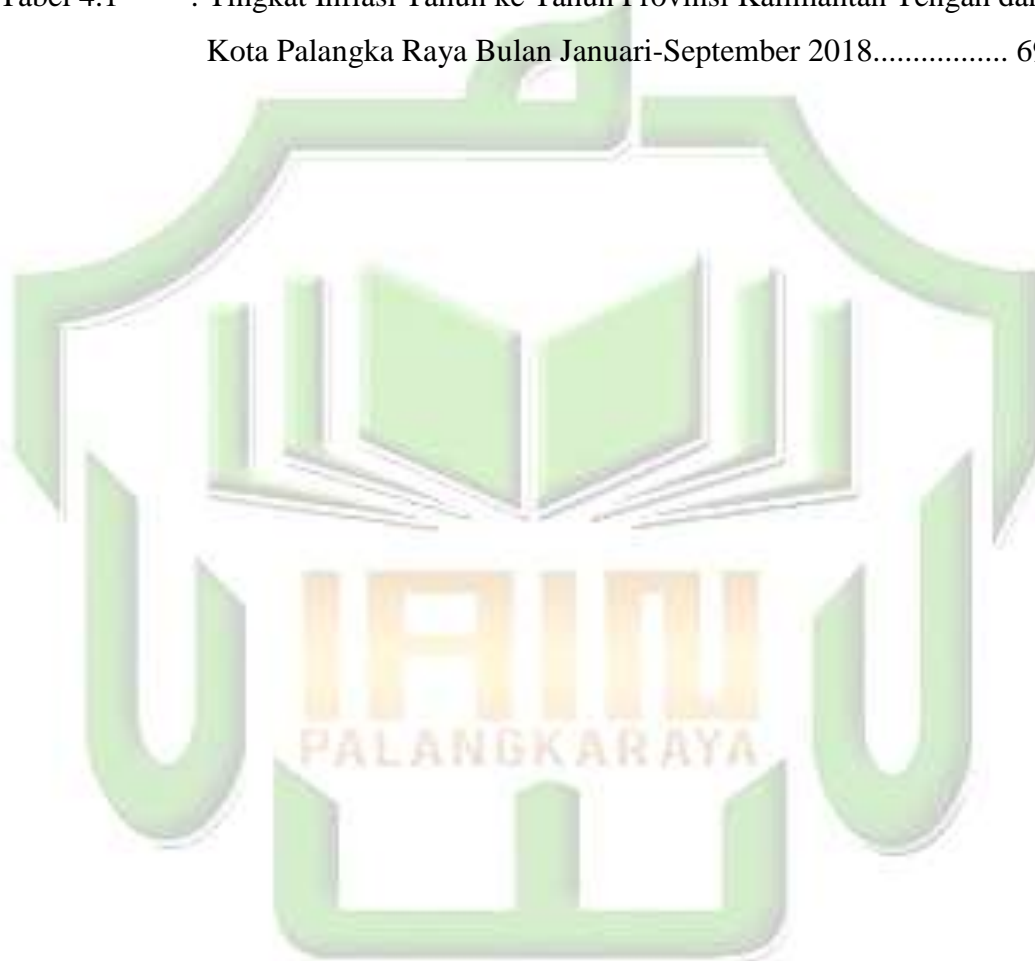
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Target Inflasi dan Aktual Inflasi.....	3
Tabel 1.2	: Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya 2013-2017.....	5
Tabel 2.1	: Kerangka Pikir Peneliti.....	35
Tabel 3.1	: Subjek Penelitian.....	38
Tabel 4.1	: Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya Bulan Januari-September 2018.....	69



DAFTAR SINGKATAN

BBM	: Bahan Bakar Minyak
BI	: Bank Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
COICOP	: <i>the Classification of Individual Consumption by Purpose</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
IHK	: Indeks Harga Konsumen
ITF	: <i>Inflation Targeting Framwork</i>
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
MENKEU	: Menteri Keuangan
PAN-RB	: Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
PIHPS	: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
PP	: Pasar Penyeimbang
RAPI-SKPD	: Rencana Aksi Pengendalian Inflasi-Satuan Kerja Perangkat Daerah
RAPI-TPID	: Rencana Aksi Pengendalian Inflasi-Tim Pengendalian Inflasi Daerah
RKPI	: Rencana Kerja Pengendalian Inflasi
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
SBH	: Survei Biaya Hidup
SDA	: Sumber Daya Alam
SK	: Surat Keputusan
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOPD	: Satuan Organisasi Perangkat Daerah
TPI	: Tim Pengendalian Inflasi
TPID	: Tim Pengendalian Inflasi Daerah
UU	: Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laju Inflasi Tahun ke Tahun Provinsi Kalimantan Tengah, 2013-2017
- Lampiran 2 : Inflasi Tahunan Kota IHK se-Indonesia Tahun 2013-2017
- Lampiran 3 : Penelitian Terdahulu
- Lampiran 4 : Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- Lampiran 5 : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah
- Lampiran 6 : Rencana Kerja Pengendalian Inflasi (RKPI)
- Lampiran 7 : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ Tanggal 2 April 2013 Tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah
- Lampiran 8 : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/490/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/199/2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- Lampiran 9 : Surat Perintah Tugas Nomor 188.4/0022/EK
- Lampiran 10 : Dokumen Pendukung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut analisis ekonomi, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran akan mendorong kenaikan harga barang. Dampak terhadap kenaikan harga adalah tingginya tingkat inflasi, tingginya tingkat inflasi akan menggerogoti pendapatan riil masyarakat dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan ironisnya tingginya inflasi dapat menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan.¹

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian.² Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota. Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran berdasarkan *the Classification*

¹Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Pengendali Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Buku Panduan, t.d.t., h. 1.

²M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 84.

of Individual Consumption according to Purpose (COICOP)³, yaitu: kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau; kelompok perumahan; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan dan olahraga; kelompok transportasi dan komunikasi.⁴

Pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan *Inflation Targeting Framework* (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (*base money*) sebagai sasaran kebijakan moneter. Melalui kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut.⁵

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh Pemerintah. Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang rendah dan stabil. Sebelum UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia.

³*Classification of Individual Consumption according to Purpose* (COICOP) atau Klasifikasi Konsumsi Individu menurut Tujuan adalah Klasifikasi Referensi yang diterbitkan oleh Divisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membagi tujuan pengeluaran konsumsi perorangan yang dikeluarkan oleh tiga sektor kelembagaan, yaitu rumah tangga, lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga, dan pemerintah umum.

⁴Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Pengendali Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Buku Panduan, h. 3.

⁵Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/moneter/kerangka-kebijakan/Contents/Default.aspx> (online 13 Februari 2018).

Sementara setelah UU tersebut, dalam rangka meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia maka sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah.⁶ Target atau sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bisa dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Target Inflasi dan Aktual Inflasi

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual (%, yoy)
2013	4.5±1%	8,38
2014	4.5±1%	8,36
2015	4±1%	3,35
2016	4±1%	3,02
2017	4±1%	3,61

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan pengamatan pada Tabel di atas, dapat dilihat bahwa inflasi aktual masih meleset dari target inflasi yang ditetapkan. Dari lima pengamatan yaitu dari 2013-2017, hanya terdapat tiga pengamatan yang memenuhi target inflasi, yaitu pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Selebihnya inflasi aktual yang terjadi terdapat beberapa yang melebihi target inflasi maupun lebih rendah dari target inflasi yang ditetapkan. Bahkan pada tahun 2013 dan 2014, inflasi aktual di Indonesia jauh melampaui target yang ditetapkan karena naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang juga berdampak pada perekonomian di Indonesia.

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola harga yang berasal dari sisi permintaan *agregat (demand management)* relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan dan yang

⁶Penetapan Target Inflasi, <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/bi-dan-inflasi/Contents/Penetapan.aspx> (online 13 Februari 2018).

bersifat sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Sementara inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (*shocks*) seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan diwakili oleh kelompok *volatile food* dan *administered prices* yang mencakup kurang lebih 40% dari bobot IHK. Kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi sangat terbatas apabila terdapat kejutan (*shocks*) yang sangat besar seperti ketika terjadi kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan adanya lonjakan inflasi. Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan (*shocks*) dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut.⁷

Menyadari pentingnya peran dan koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan peran TPI di level pusat dan dan TPID di daerah, maka

⁷Pengendalian Inflasi, <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/bi-dan-inflasi/Contents/Pengendalian.aspx> (online 13 Februari 2018).

pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID.⁸

Inflasi nasional terbentuk dari inflasi daerah, sehingga penelitian tentang inflasi di tingkat daerah sangat diperlukan. Penghitungan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di dua kota pemantauan IHK (Indeks Harga Konsumen) yaitu Kota Palangka Raya dan Sampit. Tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya dari tahun 2013-2017 bisa dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya dan Nasional 2013-2017

Tahun	Target Inflasi	Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Nasional
2013	4.5±1%	6,45	6,79	8,38
2014	4.5±1%	6,63	7,07	8,36
2015	4±1%	4,20	4,74	3,35
2016	4±1%	1,91	2,11	3,02
2017	4±1%	3,11	3,18	3,61

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan data pada Tabel di atas diketahui bahwa tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya selama kurun waktu lima tahun terakhir sudah cukup baik. Selama 2013-2017, tingkat inflasi tahun ke tahun tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,07 persen untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan 6,63 persen untuk Kota Palangka Raya, dikarenakan naiknya harga BBM. Meskipun demikian, angka tersebut tetap berada dibawah tingkat inflasi nasional tahun 2014 yaitu sebesar 8,36 persen. Selama tiga tahun terakhir tingkat

⁸Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Pengendali Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Buku Panduan, h. 5-6.

inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya tidak melebihi dari target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, bahkan pada tahun 2016 tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya jauh dibawah dari target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada tahun 2014, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalteng dinobatkan sebagai TPID terbaik tahun 2013 di kawasan Indonesia Timur (Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua). Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Kalteng pada acara Rakornas TPID ke-5 se-Indonesia tanggal 21 Mei 2014 di Jakarta.⁹ Provinsi Kalimantan Tengah juga masuk dalam daftar Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015, Kalteng terpilih karena telah melakukan inovasi dalam Sistem Pengendalian Inflasi.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi khususnya di Kota Palangka Raya. Penelitian ini akan dituangkan kedalam bentuk tulisan dengan judul: **MANAJEMEN KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI KOTA PALANGKA RAYA.**

⁹TPID Kalteng Terbaik se Indonesia Timur, <http://kalteng.prokal.co/read/news/7190-tpid-kalteng-terbaik-se-indonesia-timur> (online 14 Juni 2017).

¹⁰Wapres Serahkan Piala Kepada Top 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/3252-wapres-serahkan-piala-kepada-top-25-inovasi-pelayanan-publik-2015> (online 14 Juni 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana pengorganisasian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya?
4. Bagaimana pengendalian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui pengorganisasian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya.

4. Untuk mengetahui pengendalian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis yang di uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca dibidang keilmuan ekonomi khususnya tentang inflasi.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang ekonomi dalam hal kepentingan ilmiah.
- c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada Instansi/Organisasi yang terkait guna meningkatkan Tim Pengendalian Inflasi di daerah lain.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, yang terdiri dari: penelitian terdahulu, kajian teoritis dan kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari: waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, yang terdiri dari: sekilas mengenai lokasi penelitian, gambaran umum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah, manajemen kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya

BAB V Penutup, yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis perlu dijadikan acuan tersendiri. Pada hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah hal terkait dengan masalah manajemen ataupun masalah inflasi dan tim pengendalian inflasi.

Berdasarkan permasalahan tentang penelitian mengenai manajemen, maka penulis memiliki acuan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Yuli Ariadi (2015) tentang “Praktik-praktik Manajemen Kinerja pada Organisasi Sektor Publik dan Hubungannya dengan Kinerja Organisasi (Studi pada Satuan Kerja Pengelola Dana APBN di Indonesia)”, merupakan penelitian tentang penerapan manajemen kinerja dalam ruang lingkup organisasi sektor publik (instansi-instansi pemerintahan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan praktik-praktik manajemen kinerja (tujuan yang jelas dan terukur) pada organisasi sektor publik berpengaruh secara positif terhadap kinerja organisasi dalam kinerja kuantitatif dan kinerja kualitatif. Penerapan Insentif pada organisasi sektor publik berpengaruh secara positif terhadap kinerja organisasi dalam kinerja kuantitatif tapi tidak berpengaruh pada kinerja kualitatif.¹¹

¹¹Yuli Ariadi, “*Praktik-praktik Manajemen Kinerja pada Organisasi Sektor Publik dan Hubungannya dengan Kinerja Organisasi (Studi pada Satuan Kerja Pengelola Dana APBN di Indonesia)*”, Skripsi Sarjana, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015, h. vii, t.d.

Penelitian yang dilakukan oleh Mamik Wahjuanto (2010) tentang “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia”, merupakan penelitian tentang pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan kurs valuta asing terhadap laju inflasi di Indonesia. Setelah dilakukan uji statistik untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel bebas Jumlah Uang Beredar (X_1), Pengeluaran Pemerintah (X_2), Tingkat Suku Bunga (X_3) dan Kurs Valuta Asing (X_4) terhadap variabel terikatnya Laju Inflasi (Y) diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variabel bebas berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap Laju Inflasi di Indonesia. Terdapat pengaruh secara parsial variabel Jumlah Uang Beredar (X_1) dan Tingkat Suku Bunga (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Laju Inflasi di Indonesia, sedangkan variabel Pengeluaran Pemerintah (X_2) dan Kurs Valuta Asing (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Laju Inflasi di Indonesia (Y).¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Surya Dharma (2014) tentang “Analisis Peranan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terhadap Pengendalian Inflasi (Studi Kasus: Provinsi Sumatera Utara)”, merupakan acuan bagi peneliti mengenai masalah manajemen kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Problematika peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Utara, yaitu: apakah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berperan terhadap pengendalian Inflasi Sumatera Utara, sebelum dan setelah dibentuknya Tim Pemantuan dan

¹²Mamik Wahjuanto, “*Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Laju Inflasi di Indonesia*”, Skripsi Sarjana, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2010, h. xi, t.d.

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan bagaimana Tingkat Persistensi Inflasi Sumatera Utara. Penelitian ini menemukan adanya pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berperan terhadap pengendalian inflasi Provinsi Sumatera Utara dan telah memberikan pengaruh yang baik terhadap pengendalian inflasi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk tingkat persistensi inflasi Provinsi Sumatera Utara ditemukan tingkat persistensi inflasi yang rendah. Kelompok komoditi dengan tingkat persistensi inflasi tertinggi adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar serta kelompok komoditi bahan makanan. Penelitian ini juga menemukan bahwa jangka waktu yang dibutuhkan oleh kelompok pengeluaran untuk kembali ke nilai alaminya yaitu 3,3 hari hingga 16,15 hari. Sedangkan untuk adanya pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah memberikan pengaruh yang baik bagi inflasi dan persistensi inflasi Provinsi Sumatera Utara. Setelah dibentuknya TPID, inflasi dan persistensi inflasi Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan.¹³

Penelitian ini mengangkat judul tentang “Manajemen Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya”. Jadi, karena yang menjadi objek dan subjek dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu sehingga rumusan masalah yang akan dibahas juga berbeda.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada Tabel 2.1 yang penulis lampirkan pada lampiran 3.

¹³Surya Dharma, “*Analisis Peranan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terhadap Pengendalian Inflasi (Studi Kasus: Provinsi Sumatera Utara)*”, Skripsi Sarjana, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014, h. i, t.d.

B. Kajian Teoritis

1. Manajemen Kerja

a. Manajemen

1) Pengertian Manajemen

Banyak sumber mengenai istilah manajemen secara *etimologis*, di antaranya istilah manajemen berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti “tangan” (*Online Etymology*), dalam bahasa Italia *maneggiare* yang berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa Prancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur” (*Oxford English Dictionary*), sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Pengaturan yang dilakukan melalui proses aktivitas dan diatur berdasarkan urutan dan fungsinya dinamakan *Manajemen*. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi pemerintahan dan sebagainya.¹⁴

Sebenarnya bila kita berbicara mengenai definisi manajemen tidak akan pernah ada definisi yang dapat memuaskan, karena manajemen memerlukan waktu dan tempat yang berbeda dalam penerapannya. *Pertama* yang tercakup dalam manajemen adalah pencapaian tujuan atau sasaran inilah peran manajer yang sangat penting. *Kedua* manajemen menyangkut hubungan dengan orang lain, karena

¹⁴Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Cetakan Kesatu, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, h. 1.

seluruh aktivitas manajemen berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, yaitu bawahan.

Jadi pengertian manajemen adalah suatu proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹⁵

2) Fungsi-fungsi Manajemen

a) Perencanaan (*Planning*)

Planning berasal dari kata *plan*, artinya rencana, rancangan, maksud, dan niat. *Planning* berarti perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang didalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan.

Perencanaan merupakan tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif, kebijaksanaan, prosedur, dan program. Perencanaan juga merupakan keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan

¹⁵Ibid, h. 4-5.

pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.¹⁶

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat perencanaan adalah sebagai berikut:

- Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan

Langkah ini berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam penentuan tujuan, disusun pula prioritas utama dan sumber daya yang dimiliki sehingga memudahkan pelaksanaan rencana.

- Menentukan keadaan, situasi, dan kondisi sekarang

Situasi sekarang perlu diperhatikan sebelum perencanaan dibuat kemudian ukur menurut kemampuan organisasi dari seluruh komponen yang ada secara sistematis.

- Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat

Memperkuat semua faktor yang mendukung terlaksananya perencanaan dan meminimalisasikan semua faktor yang akan menghambat. Demikian pula, dengan antisipasi terhadap gangguan yang akan datang secara tidak terduga.

- Mengembangkan rencana dan menjabarkannya

Pengembangan rencana dan penjabarannya harus dipahami oleh seluruh pelaksana kegiatan sehingga memudahkan tercapainya sasaran dan tujuan. Caranya adalah dengan mengembangkan

¹⁶Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cetakan Kesatu, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010, h. 98-99.

berbagai alternatif yang dapat dijadikan solusi permasalahan yang berkembang ketika rencana sudah dilaksanakan.¹⁷

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing sehingga terintegrasi hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif yang harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Dalam pengorganisasian dilakukan hal-hal berikut:

- Penerimaan fasilitas, perlengkapan, dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana;
- Pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi yang teratur;
- Pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi;
- Penentuan metode kerja dan prosedurnya;
- Pemilihan, pelatihan, dan pemberian informasi kepada staf.¹⁸

c) Pelaksanaan (*Actuating*)

Actuating adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya.

¹⁷Ibid, h. 108-109.

¹⁸Ibid, h. 110-111.

Para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervisi, dengan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok. Dengan demikian dalam *actuating* terdapat hal-hal sebagai berikut:

- Penetapan saat awal pelaksanaan rencana kerja;
- Pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan;
- Pemberian motivasi para pekerja untuk segera bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- Pengomunikasian seluruh arah pekerjaan dengan semua unit kerja;
- Pembinaan para pekerja;
- Peningkatan mutu dan kualitas kerja;
- Pengawasan kinerja dan moralitas pekerja.¹⁹

d) Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian (*controlling*), yakni meneliti dan mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personal.

Pengendalian terdiri atas:

¹⁹Ibid, h. 116.

- Penelitian terhadap hasil kerja sesuai dengan rencana/program kerja;
- Pelaporan hasil kerja dan pendataan berbagai masalah;
- Evaluasi hasil kerja dan *problem solving* (penyelesaian atau pemecahan masalah).²⁰

b. Kerja

Kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan melakukan sesuatu, sedangkan menurut Brown kerja merupakan penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif.²¹ Penulis menyimpulkan bahwa kerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok untuk bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

c. Manajemen Kerja

Pengertian manajemen dan kerja di atas penulis simpulkan bahwa manajemen kerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Jadi, maksud manajemen kerja dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan cara kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia

²⁰Ibid, h. 113-114.

²¹Mujib Ridwan, Pengertian Kerja Menurut Para Ahli, <http://walangkopo99.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-kerja-menurut-para-ahli.html> (online 29 Maret 2018).

tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, *shocks* terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (*administered prices*).

Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap *shocks* tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama koordinasi lintas inflasi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level Daerah (TPID) pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas

peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kemendagri.²²

a. Pembentukan TPI

Pembentukan TPI didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan No.88/KMK.02/2005 dan Gubernur Bank Indonesia No.7/9/KEP.GBI/2005. Untuk selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan tugas TPI diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu) yang ditetapkan setiap tahun.

TPI dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan satu sasaran yang ingin dicapai Pemerintah, sebagai bagian dalam upaya menjaga stabilitas makro ekonomi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Merujuk pada pertimbangan awal pembentukan TPI yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK), di dalamnya termaktub beberapa tugas utama yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas TPI, yakni:

- 1) Melakukan koordinasi dalam rangka penetapan sasaran inflasi tiga tahun ke depan;

²²Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Pengendali Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Buku Panduan, h. 5-6.

- 2) Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan yang ditempuh;
- 3) Melakukan koordinasi dalam rangka merekomendasikan pilihan kebijakan yang mendukung kepada pencapaian sasaran inflasi kepada Menteri Keuangan.

Selain BI, keanggotaan TPI adalah dari instansi Pemerintah yang kebijakannya berkaitan dengan kebijakan di bidang harga dan pendapatan. Dengan pertimbangan tersebut, keanggotaan TPI dari instansi terkait di Pemerintah adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.²³

b. Pentingnya TPID

Perkembangan ekonomi daerah yang berkesinambungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting untuk menjaga tingkat inflasi. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan berfluktuasi memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi, selain menggerus daya beli, juga akan menyulitkan pelaku usaha di dalam mengkalkulasi biaya input produksi dan secara makro dapat mengganggu

²³Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Pengendali Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Buku Panduan, h. 6-7.

kinerja pertumbuhan ekonomi. Data historis menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh *supply shocks* dan kebijakan *administered price*. Jika sumber inflasi adalah gangguan disisi produksi, maka penanganan jangka pendeknya dapat dilakukan dengan relatif cepat, yaitu antara lain dengan cara meningkatkan pasukan melalui impor maupun intervensi pasar yang terukur dengan tetap memperhatikan keseimbangan disisi permintaan dan penawaran dalam penanganan jangka panjang dapat juga dilakukan dengan cara meningkatkan produksi melalui peningkatan kapasitas. Namun demikian, jika faktor penyebab inflasi adalah kebijakan *administered price*, maka penanganannya relatif lebih sulit dan dampaknya dapat bersifat langsung maupun tidak langsung dan bersifat struktural. Sementara itu, kalau faktor penyebab inflasi adalah karena peningkatan konsumsi maka kebijakan Bank Indonesia akan lebih efektif.

Mengingat inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh sisi penawaran, maka koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah dan pihak terkait lainnya harus kuat. Hal tersebut dilandasi kesadaran bahwa inflasi bukan hanya dipengaruhi oleh fenomena moneter, melainkan juga fenomena fiskal dan sektor riil. Koordinasi tidak hanya dilaksanakan di level pemerintah pusat, namun juga harus dilaksanakan di level Daerah karena lebih dari 70% inflasi di Indonesia bersumber dari Inflasi di daerah.²⁴

3. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

²⁴Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Pengendali Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Buku Panduan, h. 7.

Inflasi adalah suatu kondisi atau keadaan terjadinya kenaikan harga untuk semua barang secara terus-menerus yang berlaku pada suatu perekonomian tertentu.²⁵ Apabila terjadi kenaikan harga pada satu atau dua jenis barang, belum atau tidak dapat dikatakan inflasi. Demikian juga apabila kenaikan harga barang terjadi dalam waktu sangat singkat, misalnya kenaikan secara musiman menjelang hari raya lebaran, tahun baru dan lain sebagainya, belum dapat dikatakan inflasi karena setelah peristiwa hari raya tersebut, harga barang-barang turun kembali menjadi normal. Jadi kenaikan harga-harga tersebut tidak berlangsung secara terus-menerus dan segera berakhir, sehingga tidak memerlukan kebijakan moneter atau kebijakan ekonomi secara khusus untuk menanggulangnya.²⁶

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makro ekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga dan bahkan distribusi pendapatan.²⁷

b. Gambaran Umum Suatu Proses Inflasi

Apabila pemerintah menjalankan kebijakan moneter *deficit spending* (pengeluaran lebih besar dari pendapatan) sedemikian rupa sehingga volume uang yang beredar terus bertambah, maka untuk beberapa waktu kemudian akan tumbuh suatu proses inflasi. Sebagai contoh misalnya pemerintah

²⁵Detri Karya dan Syamri Syamsuddin, *Makroekonomi: Pengantar Untuk Manajemen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, h. 89.

²⁶Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 116.

²⁷Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Edisi 1, Jakarta: Gaung Persada, 2013, h. 61.

terpaksa menjalankan kebijakan *deficit spending* dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang semakin besar, maka penambahan permintaan dari pemerintah tersebut akan mendorong meningkatnya produksi. Pada taraf awal kenaikan produksi barang-barang tersebut akan dibarengi atau mungkin juga tidak akan dibarengi dengan kenaikan tingkat harga. Hal tersebut tergantung dari kondisi persediaan barang-barang. Apabila persediaan barang cukup memadai maka tidak akan terjadi kenaikan harga, namun sebaliknya apabila persediaan sedikit atau bahkan kosong, maka harga akan naik. Namun lambat laun bagaimanapun juga persediaan itu akan habis dan hal tersebut akan mendorong peningkatan produksi. Selama cadangan kapasitas faktor-faktor produksi masih ada yang kemudian diaktifkan, sehingga produksi menjadi naik, maka pengeluaran pemerintah tidak akan menimbulkan inflasi. Tetapi seandainya pengeluaran pemerintah tersebut tidak dibarengi dengan pengaktifan sumber-sumber produksi yang ada atau pengeluaran tersebut tidak ditujukan untuk peningkatan, misalnya semata-mata hanya untuk tujuan-tujuan yang kurang produktif antara lain untuk proyek-proyek prestise maka ekspansi moneter akan menaikkan tingkat harga. Kenaikan harga berarti nilai uang menjadi turun. Turunnya nilai uang berarti menurunnya upah/gaji riil dan hal ini merugikan tingkat hidup kaum buruh/pegawai/karyawan penerima upah/gaji tetap.

Pada kondisi demikian mereka biasanya akan menuntut kenaikan upah/gaji, sedangkan naiknya upah/gaji berarti meningkatnya biaya produksi. Di pihak lain biaya produksi yang meningkat, secara otomatis

akan menaikkan harga jual barang-barang dan jasa. Hal ini berarti telah terjadi inflasi. Dan proses tersebut akan terus berlanjut sehingga menimbulkan tingkat inflasi yang lebih tinggi, itulah sebabnya proses ini sering disebut *spiral inflation*.²⁸

c. Faktor Penyebab Inflasi

Pada hakikatnya terdapat 2 (dua) faktor penting sebagai penyebab inflasi, yaitu faktor *demand* dan *supply* terhadap uang. Inflasi yang disebabkan faktor *demand* dikenal dengan *Demand Inflation*, dan yang bersumber dari faktor *supply* disebut dengan *Cost Push Inflation*. Namun, bagi negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, inflasi juga dapat ditimbulkan dari luar negeri. Sumber atau penyebab inflasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Inflation*)

Pada masa perekonomian suatu negara tumbuh secara pesat, dimana kesempatan kerja teralokasikan penuh (*full employment*), tingkat pendapatan masyarakat menjadi bertambah, baik bersumber dari upah/gaji, sewa, bunga maupun deviden. Dengan kata lain, bertambahnya daya beli masyarakat. Kenaikan daya beli masyarakat akan mendorong pada peningkatan pengeluaran membeli barang dan jasa. Bila peningkatan permintaan tidak mampu diikuti oleh peningkatan produksi barang dan jasa, maka untuk mengantisipasi besarnya kenaikan *aggregate demand* yang melebihi dari kemampuan menghasilkan barang dan jasa

²⁸Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, h. 116-117.

adalah dengan menaikkan harga barang dan jasa beredar, maka terjadilah inflasi. Inflasi ini biasa juga dikenal dengan *demand inflation*.

2) Inflasi Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*)

Inflasi ini juga terjadi pada kondisi perekonomian berkembang secara pesat, dengan tingkat pengangguran tergolong rendah. Dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat, mendorong buruh/karyawan untuk menuntut kenaikan upah. Selanjutnya pada kondisi perekonomian tumbuh pesat, perusahaan berusaha menambah tenaga kerja untuk membantu meningkatkan volume produksi. Keadaan ini juga akan menyebabkan kenaikan upah dan gaji. Naiknya tingkat upah dan gaji sudah tentu menaikkan biaya produksi dan operasi. Kenaikan biaya produksi dan operasi mendorong pada kenaikan harga jual produk, sehingga terjadi inflasi.²⁹

d. Teori-teori Tentang Inflasi

Pada dasarnya ada 3 (tiga) macam teori tentang inflasi, yaitu:

1) Teori Kuantitas, yaitu teori yang menganalisis peranan dari:

a) Jumlah uang yang beredar;

Menurut teori ini penambahan volume uang yang beredar sangat dominan terhadap kemungkinan timbulnya inflasi. Tanpa adanya penambahan jumlah uang yang beredar, baik uang kartal maupun uang giral, walaupun seandainya terjadi kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga sementara saja. Jadi teori ini

²⁹Detri Karya dan Syamri Syamsuddin, *Makroekonomi: Pengantar Untuk Manajemen*, h. 90.

berpendapat bahwa pertambahan jumlah uang yang beredarlah yang menjadi penyebab utama inflasi. Dengan demikian menurut teori ini apabila jumlah uang tidak ditambah, kenaikan harga akan berhenti dengan sendirinya.

- b) Harapan/dugaan (*expectation*) dari masyarakat mengenai kemungkinan naiknya harga-harga, sehingga peranan psikologis dalam hal ini lebih dominan dibanding pertimbangan ekonomis.

Di pihak lain masalah yang tak kalah pentingnya ialah masalah psikologis yang menyangkut dugaan, perkiraan atau harapan (*expectation*) dari masyarakat mengenai kemungkinan kenaikan harga di masa yang akan datang. Walaupun andaikata jumlah uang yang beredar bertambah tetapi masyarakat belum mengaharap atau lebih tepatnya belum menduga bahwa harga-harga akan naik, maka pertambahan uang tersebut hanya akan menambah simpanan atau uang kas/tunai mereka masing-masing jadi tidak atau belum dibelanjakan. Dengan demikian harga barang-barang tidak naik. Tetapi kalau masyarakat menduga bahwa besok lusa atau dalam waktu dekat di masa yang akan datang, harga barang-barang akan segera naik, maka orang cenderung untuk membelanjakan uangnya karena khawatir apabila uang tersebut disimpan terus, nilainya akan merosot. Dengan demikian maka terjadilah kenaikan harga barang-barang sebagai awal dari proses inflasi.

2) Teori Inflasi dari Keynes

Menurut Keynes, inflasi pada dasarnya disebabkan ketidakseimbangan antara permintaan masyarakat (*demand*) terhadap barang-barang dagangan (T) dengan penawaran (*supply*) atau persediaan (*stock*), dimana permintaan lebih banyak dibandingkan barang-barang yang tersedia, sehingga terdapat *gap* atau jurang yang disebut *inflationary gap*.³⁰

3) Teori Struktural

Teori ini berlandaskan kepada struktur perekonomian dari suatu negara dan biasanya menyangkut negara-negara berkembang.

Menurut teori ini, inflasi disebabkan karena:

- a) Ketidakelastisan atau kekakuan penerimaan hasil ekspor dimana hasil ekspor memang meningkat, tetapi sangat lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Peningkatan hasil ekspor yang lambat tersebut antara lain disebabkan karena harga barang yang diekspor, biasanya berupa bahan-bahan mentah, kurang/tidak menguntungkan dibandingkan dengan kebutuhan barang-barang yang diimpor yang harus dibayar, yang biasanya barang-barang hasil industri. Dengan perkataan lain *term of trade* atau daya tukar barang-barang negara tersebut semakin memburuk. Dapat pula terjadi bahwa ketidakelastisan hasil ekspor tersebut disebabkan karena *supply* atau produksi barang-barang ekspor tidak

³⁰Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, h. 122-123.

responsif terhadap kenaikan harga, sehingga pada saat harga barang-barang tersebut naik, produksi sulit untuk ditingkatkan atau bahkan berkurang antara lain karena kegagalan panen atau sebab-sebab lainnya.

Kelambanan pertumbuhan penerimaan hasil ekspor tersebut berdampak pada kurang mampunya mengimpor barang-barang yang dibutuhkan, sehingga negara tersebut mengambil kebijakan untuk memproduksi barang-barang tertentu di dalam negeri, sebagai pengganti/substitusi dari barang-barang yang biasanya diimpor meskipun sering kali biaya produksi di dalam negeri tersebut jauh lebih tinggi. Bahkan sering kali dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang diimpor. Biaya produksi yang tinggi tersebut mengakibatkan harga naik. Apabila proses substitusi barang-barang yang diimpor tersebut meluas dalam arti melibatkan banyak produk, maka semakin banyak barang-barang yang harganya naik, maka terjadilah inflasi.³¹

b) Ketidak Elastisan/Kelakuan *Supply* Produksi Bahan Makanan Pokok

Ketidakelastisan produksi bahan makanan pokok di dalam negeri, sering kali terjadi di negara-negara berkembang sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan produksi bahan

³¹Ibid, h. 123-124.

makanan dengan jumlah penduduk dimana pertumbuhan *supply* bahan makanan tersebut tertinggal jauh dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian maka harga bahan makanan pokok akan melonjak. Akibatnya timbul tuntutan kenaikan upah dan gaji dari kaum buruh dan karyawan/pegawai, sedangkan kenaikan upah dan gaji akan menyebabkan produksi naik. Biaya produksi yang naik akan menyebabkan harga jual naik, maka terjadilah inflasi.

Namun dalam kenyataannya proses inflasi yang disebabkan karena ketidakelastisan penerimaan hasil ekspor dan karena ketidakelastisan produksi bahan makanan pokok, jarang terjadi sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama bahkan sering kali memperkuat satu sama lainnya. Misalnya, tertinggalnya produksi bahan makanan dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat, menyebabkan impor meningkat. Impor yang meningkat akan menyebabkan tekanan pada neraca pembayaran yang selanjutnya mendorong proses produksi substitusi impor yang berlebihan yang akhirnya menyebabkan naiknya harga barang-barang.³²

e. Dampak Inflasi

Kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan dan terus-menerus berdampak pada penurunan nilai mata uang suatu negara dan

³²Ibid, h.124-125.

mengakibatkan daya beli terhadap uang menjadi semakin lemah. Kemudian penurunan daya beli tersebut berdampak negatif pada suatu perekonomian secara keseluruhan baik pada individu, dunia usaha serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.

Ketidakpastian besarnya laju inflasi menimbulkan beban signifikan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Laju inflasi yang berfluktuasi dan tidak menentu akan mengakibatkan perubahan harga-harga secara relatif pada tingkat harga secara umum, dan hal tersebut sangat berbahaya karena dalam sistem ekonomi pasar, tingkat harga merupakan sinyal bagi rumah tangga maupun bagi dunia usaha tentang keseimbangan alokasi sumber daya ekonomi dalam suatu perekonomian.

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap perekonomian, tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi. Adapun dampak positif dan dampak negatif inflasi adalah sebagai berikut:

1) Dampak Positif dari Inflasi

a) Bagi Perekonomian

Jika tingkat inflasi ringan, akan membawa pengaruh positif dalam arti dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu

meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung dan berinvestasi.

b) Bagi Pengusaha

Dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang tidak akan merugikan sebagian kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap. Contohnya seperti pengusaha, karena para pengusaha mendapatkan penghasilan berdasarkan keuntungan.

c) Bagi Debitur

Debitur akan merasa diuntungkan dengan adanya inflasi, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam.

d) Bagi Produsen

Bagi produsen, inflasi pun dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi.

2) Dampak Negatif dari Inflasi

a) Bagi Perekonomian

Pada masa hiperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali, kondisi perekonomian menjadi sulit berkembang. Masyarakat tidak bersemangat untuk bekerja, menurunkan minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi karena nilai mata uang semakin menurun.

b) Bagi Pegawai atau Karyawan Berpenghasilan Tetap

Dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang akan merugikan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai negeri, pegawai swasta, dan kaum buruh, karena secara riil pendapatan mereka akan menurun.

c) Bagi Kreditur

Kreditur akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian utang debitur lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman.

d) Bagi Produsen

Bagi produsen inflasi yang tinggi sangat berpengaruh pada kenaikan harga-harga kebutuhan produksi yang kemudian berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi.

e) Bagi Pemerintah

Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada rencana pembangunan pemerintah dan mengacaukan rencana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (RAPBN/RAPBD).³³

f. Pengendalian Inflasi

Inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan moneter dan fiskal. Apabila ingin mengendalikan laju inflasi melalui kebijakan moneter maka tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang atau peredaran uang. Instrumen yang sangat populer digunakan oleh institusi moneter adalah menaikkan suku bunga. Tindakan ini akan

³³Rahma Fazri Aldila, “*Dampak Inflasi Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kota Tasikmalaya*”, Skripsi Sarjana, Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas, 2014, h. 18-21, t.d.

mengurangi para penanam modal untuk mengurangi kegiatan investasinya. Sehingga mengurangi peredaran uang dimasyarakat dan daya beli masyarakat berkurang. Dengan demikian harga atau laju inflasi dapat dikendalikan.

Jika pemerintah ingin mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal maka pemerintah dapat menggunakan dua instrumen utamanya, yaitu melalui belanja pemerintah dan pajak. Melalui pembelanjanya pemerintah dapat mengurangi pengeluarannya agar peredaran uang dapat dimasyarakat sehingga permintaan atau daya beli masyarakat berkurang. Dengan demikian harga atau inflasi dapat dikendalikan. Kebijakan fiskal pemerintah selain menggunakan instrumen pengeluarannya juga dapat menggunakan pajak. Melalui pajak pemerintah dapat menekan laju inflasi dengan menaikkan pajak. Dengan dinaikkan pajak maka uang ditangan masyarakat dapat ditarik ke tangan pemerintah, sehingga daya beli masyarakat berkurang. Dengan demikian harga atau laju inflasi dapat dikendalikan.³⁴

C. Kerangka Pikir

Inflasi adalah salah satu indikator ekonomi yang sangat penting dan strategis sehingga harus dikendalikan melalui berbagai upaya atau kegiatan secara terencana, bersinergi dan komprehensif. Maka dari itu sangat diperlukannya penerapan dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu:

1. Perencanaan, adalah pemilihan serangkaian kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

³⁴Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Edisi 1, h. 66-67.

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang.

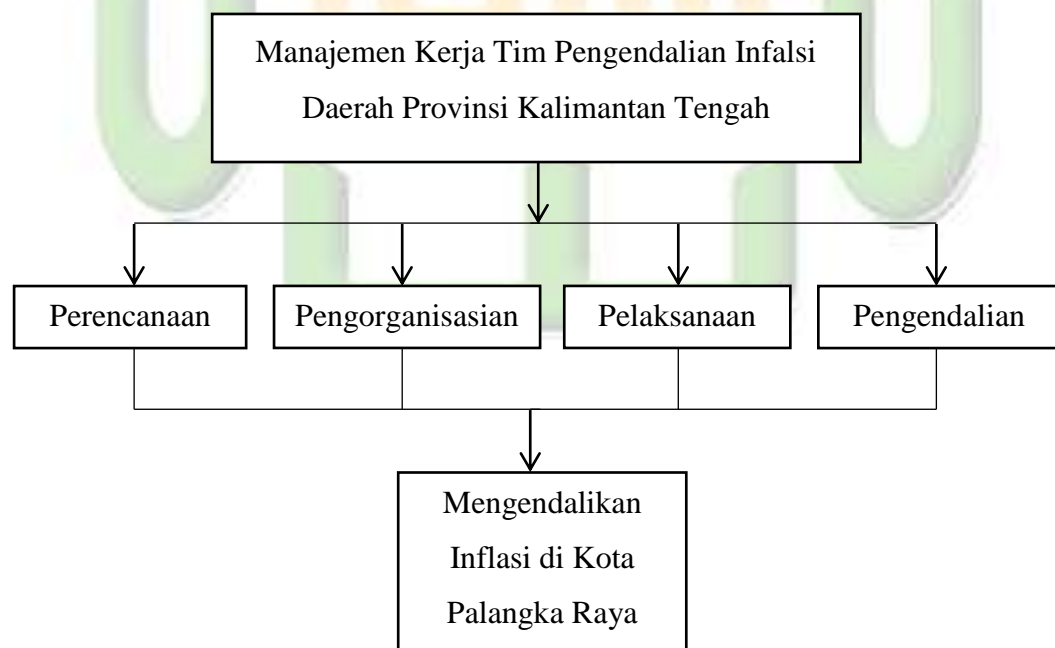
2. Pengorganisasian, merupakan proses penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.
3. Pelaksanaan, adalah suatu tindakan yang dikerjakan berdasarkan perencanaan dan struktur organisasi.
4. Pengendalian, merupakan pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana.

Penerapan dari fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat tercapainya tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

Adapun kerangka pikir dari rencana penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2.2

KERANGKA PIKIR PENELITI



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian tentang Manajemen Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya ini dilaksanakan selama 3 bulan setelah surat izin penelitian dikeluarkan. Waktu yang digunakan ini adalah untuk menggali data dan informasi dari para subjek yang berada di lokasi penelitian disajikan kedalam sebuah skripsi, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pembimbingan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang beralamat di Jl. RTA Milono No. 1, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³⁵ Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan secara lugas dan terperinci mengenai “Manajemen Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah

³⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 309.

(TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya”. Sehingga data yang di dapat murni dari responden langsung, agar tidak ada kemungkinan data yang di dapat palsu atau rekayasa.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.³⁶ Objek dalam penelitian ini adalah manajemen kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya.

Sedangkan subjek penelitian adalah benda, hal, orang tempat data untuk variabel penelitian.³⁷ Dalam hal ini subjek penelitian adalah sesuai dengan keanggotaan TPID. Dalam penelitian kualitatif penentuan subjek penelitian lebih selektif, guna membangun generalisasi teoritik.³⁸ Adapun teknik penentuan subjek yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.³⁹

Adapun ciri-ciri atau kriteria tersebut adalah:

1. Ketua TPID Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Wakil ketua TPID Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sekretaris TPID Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Anggota TPID Provinsi Kalimantan Tengah.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 29.

³⁷Ibid, h. 116.

³⁸Imam Suprayogo dan Tobrani, *Metode Penelitian Sosial – Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 165.

³⁹S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bina Aksara, 1996, h. 98.

Menurut ciri-ciri atau kriteria yang telah ditentukan oleh penulis diatas, maka didapatkan subjek penelitian 5 (lima) orang. Untuk lebih jelasnya jumlah subjek penelitian dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.1
SUBJEK PENELITIAN

No.	Kategori Subjek	Inisial
1.	Sekretaris TPID Provinsi Kalimantan Tengah	YK, SL
2.	Anggota TPID Provinsi Kalimantan Tengah	JT, FR, SI

Sumber: Diolah oleh Penulis

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut S. Margono, observasi diartikan sebagai pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.⁴⁰

Teknik observasi dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu yang diteliti, atau dengan kata lain observasi merupakan suatu cara yang memungkinkan bagi peneliti untuk mengamati

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Edisi Revisi, h. 179.

manajemen kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya.

Data yang ingin digali melalui observasi meliputi:

- a. Perencanaan yang dilakukan TPID Provinsi Kalteng dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya;
- b. Pengorganisasian TPID Provinsi Kalteng dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya;
- c. Pelaksanaan dari perencanaan yang dilakukan TPID Provinsi Kalteng dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya;
- d. Pengendalian terhadap TPID Provinsi Kalteng dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.⁴¹

Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah melalui dialog yang mendalam, terkait dengan manajemen kerja TPID Provinsi Kalteng, yang tujuannya adalah untuk menemukan jawaban dari topik penelitian tentang bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

⁴¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, h. 64.

pengendalian TPID Provinsi Kalteng dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁴² Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴³

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis, baik berupa gambaran umum lokasi penelitian, proses pengambilan informasi melalui informan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data sebagai sumber penelitian. Tahap dokumentasi ini diharapkan mampu menunjang aktivitas penelitian sebagai penguat data observasi dan wawancara tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian TPID Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi di Kota Palangka Raya.

Adapun hal-hal yang ingin di dokumentasi seperti buku panduan, surat kabar atau berita-berita yang menyangkut tentang TPID, susunan organisasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan TPID.

⁴²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2007, h.111.

⁴³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedelapan, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 82.

E. Pengabsahan Data

Maksud dari pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi adalah sesuai dan relavan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Selain itu hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian adalah benar-benar terjadi dan ada di lokasi penelitian.

Terkait secara langsung dengan pengabsahan data ini, penulis menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik* dan *teori*.⁴⁴

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan

⁴⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua Puluh Tiga, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h. 330.

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi Metode

Pada triangulasi dengan *metode*, menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi Penyidik

Teknik triangulasi jenis ketiga ini ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi dengan *teori*, menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanation*).⁴⁵

Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

⁴⁵Ibid, h. 330-331.

F. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberikan kode serta mengkategorikannya.⁴⁶

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni sebagai berikut:

1. Data *Reduction* atau pengurangan data, ialah suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, memilih mana data yang relevan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data.
2. Data *Display* atau penampilan data, ialah data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab IV berupa laporan yang tersusun secara sistematis.
3. Data *Conclusions* atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, yaitu setelah semua data-data yang diinginkan diperoleh selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.⁴⁷

⁴⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua Puluh, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 179.

⁴⁷Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Univertas Indonesia Press, 1999, h. 16-19.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Mengenai Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Jalan RTA. Milono No. 01 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Sekretariat Daerah adalah sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.⁴⁸

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a. Biro Pemerintahan;
 - b. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Biro Hukum.
3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 - a. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Biro Administrasi Pembangunan; dan
 - c. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

⁴⁸Observasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 23 Mei 2018.

4. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:

- a. Biro Organisasi;
- b. Biro Umum; dan
- c. Biro Protokol dan Komunikasi Publik.

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana di atas tersaji dalam lampiran 3:⁴⁹

B. Gambaran Umum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah

Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi, mengurangi pendapatan riil, dan mengakibatkan penurunan standar hidup masyarakat serta berpotensi meningkatkan kemiskinan. Untuk itu perlu diambil langkah pengendalian inflasi dan menekan laju inflasi dengan dilakukan langkah-langkah strategis melalui kerjasama kelembagaan daerah dalam upaya mengendalikan inflasi di Kalimantan Tengah.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut TPID Provinsi Kalimantan Tengah adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan bertugas menjaga keterjangkauan harga barang-barang dan/atau jasa-jasa melalui pengendalian inflasi di wilayah Provinsi Kalimantan

⁴⁹Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pasal 5.

Tengah. TPID lingkup Kalimantan Tengah adalah TPID yang berada pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah.⁵⁰

TPID Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk pada tahun 2009, saat ini SK yang menaungi kegiatan TPID Provinsi Kalimantan Tengah adalah SK No.188/44/212/2011 tanggal 21 Juni 2011 Tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah.⁵¹

C. Manajemen Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya

Seperti yang telah diuraikan pada kajian teori di BAB II, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Maka dari itu perlu diterapkannya manajemen dalam proses pengendalian inflasi agar inflasi yang rendah dan stabil dapat terwujud, serta tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Agar manajemen pada sebuah organisasi bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka dapat menjalankannya dengan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Anton Atoillah dalam bukunya *Dasar-Dasar*

⁵⁰Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Inflasi.

⁵¹Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Pengendali Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Buku Panduan, h. 8.

Manajemen, fungsi-fungsi manajemen terbagi menjadi 4 yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).

Pertanyaan diatas adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi khususnya di Kota Palangka Raya. Untuk itu penulis melakukan wawancara langsung dengan perwakilan dari TPID Kalteng, dengan inisial YK. Bapak YK adalah Kasubag Pengendalian Perekonomian Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang juga merupakan Sekretaris di bagian Sekretariat TPID Provinsi Kalimantan Tengah. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi khususnya Kota Palangka Raya. Berikut penuturan Bapak YK:

“Sejak tahun 2014, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui TPID melakukan pengendalian inflasi secara terencana, sistemik, sinergis, komprehensif dan teknokratik dengan membangun dan mengembangkan perangkat pengendalian yang disebut Sistem Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sistem ini dimulai dari pelaksanaan kajian, penyusunan rencana aksi, dan implementasi rencana aksi, monitoring serta evaluasi hasil inflasi. Nah, secara singkatnya sistem ini yang kami terapkan sampai sekarang dalam proses pengendalian inflasi. Tahun 2015 sistem ini masuk dalam daftar Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh PAN RB.”

Menurut penuturan dari Bapak YK dan dokumentasi yang penulis dapatkan, proses pengendalian inflasi yang diterapkan oleh TPID Kalteng dilakukan dengan membentuk dan mengembangkan perangkat pengendalian yang disebut Sistem Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah. Sistem Pengendalian Inflasi ini dimulai dari pelaksanaan kajian, penyusunan rencana

aksi, implementasi rencana aksi, monitoring dan evaluasi hasil inflasi. Sesuai dengan yang sudah dipaparkan pada latar belakang di BAB I bahwa Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam daftar Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB), Kalteng menduduki urutan ke-6 penerima Top 25 dari sebanyak 1.189 inovasi yang diperlombakan.

Kemudian untuk melengkapi hasil dari penelitian ini, penulis melampirkan naskah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah pada lampiran 4 yang penulis dapatkan dari lokasi penelitian. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan perwakilan dari TPID Kalteng serta SKPD terkait guna mengetahui bagaimana manajemen kerja TPID Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi.

1. Perencanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya

Perencanaan adalah proses kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang didalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan. penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan.⁵²

Perencanaan pengendalian inflasi daerah merupakan bagian dari perencanaan pengendalian inflasi nasional yang disusun oleh Pemerintah

⁵²Anton Atoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cetakan Kesatu, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010, h. 98.

Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kemudian untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Kalteng penulis kembali melakukan wawancara dengan Bapak YK Berikut penuturan Bapak YK:

“Perencanaan pengendalian inflasi itu didahului dengan kajian teknokratik. Dari hasil kajian tersebut kemudian menyusun RKPI, RAPI-SKPD dan RAPI-TPID.”⁵³

Menurut penuturan Bapak YK, perencanaan pengendalian inflasi dimulai dengan kajian teknokratik, kemudian menyusun RKPI, RAPI-SKPD dan RAPI-TPID. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penuturan dari Ibu SL selaku Staf Bagian Pengendalian Perekonomian yang juga merupakan anggota di bagian Sekretariat TPID Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut hasil wawancara dengan Ibu SL:

“Perencanaan pengendalian inflasi ini dimulai dengan kajian teknokratik. Kajian teknokratik itu dilakukan untuk mengetahui komoditas-komoditas pemicu inflasi/deflasi, bobot dan waktu terjadinya inflasi/deflasi selama 1 tahun rencana. Itu dilakukan oleh Tim teknis berdasarkan dari data BPS. Nah, hasil kajian itu sebagai bahan penyusunan RKPI. Lalu penyusunan RKPI dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Teknis TPID Provinsi. RKPI yang disusun itu memuat kebijakan yang akan dilaksanakan oleh SKPD terkait. Setelah itu SKPD terkait menyusun RAPI-SKPD yang memuat berbagai kegiatan pengendalian inflasi daerah yang akan dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam waktu 1 tahun rencana. Selanjutnya TPID Provinsi menyusun RAPI-TPID yang juga memuat berbagai kegiatan pengendalian inflasi daerah selama 1 tahun rencana. RAPI-TPID ini merupakan gabungan dari RAPI-SKPD.”⁵⁴

Sesuai dengan penuturan dari Bapak YK dan Ibu SL serta dokumentasi yang penulis dapatkan dari lokasi penelitian, penulis menyimpulkan bahwa

⁵³Wawancara dengan Bapak YK, di Gedung Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 23 Mei 2018.

⁵⁴Wawancara dengan Ibu SL, di Gedung Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 24 Mei 2018.

perencanaan pengendalian inflasi Kalteng didahului dengan kajian teknokratik, kajian teknokratik adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui komoditas-komoditas pemicu inflasi/deflasi, bobot dan waktu terjadinya inflasi/deflasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun rencana. Pelaksanaan kajian tersebut berdasarkan data historis inflasi/deflasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya dari data tersebut Tim teknis menyusun RKPI, RKPI atau Rencana Aksi Pengendalian Inflasi adalah dokumen perencanaan yang berisikan kegiatan pengendalian inflasi dengan disertai informasi tentang waktu pelaksanaan, pejabat/instansi penanggung jawab, dan informasi terkait lainnya yang disusun oleh TPID untuk periode 1 (satu) tahun kalender. Dari RKPI tersebut SKPD terkait menyusun RAPI-SKPD, RAPI-SKPD atau Rencana Aksi Pengendalian Inflasi SKPD adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pengendalian inflasi daerah yang berisikan nama kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, *input*, *output*, lokasi, dan penanggung jawab kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun rencana. Selanjutnya dari RAPI-SKPD tersebut TPID Kalteng menyusun RAPI-TPID, RAPI-TPID atau Rencana Aksi Pengendalian Inflasi TPID adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pengendalian inflasi daerah yang berisikan nama kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, *input*, *output*, lokasi, dan penanggung jawab kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TPID selama kurun waktu 1 (satu) tahun rencana yang merupakan gabungan dari RAPI-SKPD. Untuk memperkuat hasil

wawancara, Ibu SL memberikan beberapa salinan RKPI yang selanjutnya penulis lampirkan pada lampiran 5.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengetahui bahwa perencanaan pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalteng sesuai dengan Pedoman Pengendalian Inflasi yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015. Langkah-langkah perencanaan pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalteng sejalan dengan fungsi perencanaan yang diuraikan pada kajian teori di BAB II, menurut Anton Athoillah dalam bukunya *Dasar-Dasar Manajemen* mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat perencanaan adalah: menetapkan sasaran atau perangkat tujuan; menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; mengembangkan rencana dan menjabarkannya. Perencanaan pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalteng secara tidak langsung sudah menerapkan fungsi perencanaan, karena dari hal-hal yang dilakukan itu merupakan keseluruhan proses yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

2. Pengorganisasian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi

Pengorganisasian adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi.⁵⁵

⁵⁵Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, h. 110.

Pembentukan susunan keanggotaan TPID serta tugas dan kewajibannya mengacu pada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ Tanggal 2 April 2013 Tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah yang penulis lampirkan pada lampiran 6.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, susunan keanggotaan TPID ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Organisasi TPID Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

- a. Tim Pengarah Kebijakan, berwenang mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah.
- b. Tim Teknis, bertugas melaksanakan pertemuan bulanan; menyampaikan hasil monitoring dan laporan sumber/potensi tekanan inflasi daerah kepada Tim Pengarah Kebijakan; mengusulkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah kepada Tim Pengarah Kebijakan; dan melaksanakan diseminasi dalam upaya pencapaian target inflasi kepada masyarakat. Selain tugas tersebut Tim Teknis berwenang melakukan pengecekan kepada gudang, toko, surat menyurat untuk mengetahui kondisi stok bahan pokok strategis tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik dan/atau petugas terkait. Pada saat Tim Teknis melakukan pengecekan, pemilik dan/atau petugas terkait wajib memberikan informasi yang akurat, cepat dan benar kepada Tim Teknis.
- c. Kelompok Kerja Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber dan potensi

tekanan inflasi di wilayah kerja masing-masing serta dampaknya terhadap pencapaian target inflasi daerah; menyampaikan laporan ketersediaan barang dan jasa, distribusi dan perkembangan harga di wilayah kerja masing-masing; menyampaikan kebijakan yang telah dilakukan dan rencana kebijakan yang akan dilaksanakan; melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka Pengendalian Inflasi di Kalimantan Tengah; melaksanakan diseminasi target dan upaya pencapaian target inflasi kepada masyarakat; penyampaian rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian target inflasi kepada Pemerintah.

- d. Sekretariat Tim Teknis bertugas untuk melakukan koordinasi dan pemantauan harga pangan strategis dengan dinas terkait tingkat provinsi/kabupaten/kota; menyelenggarakan rapat TPID, baik rapat yang sudah terjadwal maupun insidental; membuat laporan hasil rapat koordinasi kepada Tim Pengarah; melakukan kompilasi terhadap laporan pemantauan harga dan informasi perkembangan harga; menyusun dan menyiapkan bahan rapat; menyusun risalah rapat; membuat dokumentasi dan surat menyurat TPID; menyiapkan bahan-bahan siaran pers; mengelola web sistem Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS); dan memberikan informasi harga pangan strategis melalui *ews.kemendag.go.id*, situs resmi dan media massa.⁵⁶

⁵⁶Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Inflasi, Pasal 22-26.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa organisasi TPID Provinsi Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengorganisasian TPID Provinsi Kalimantan Tengah penulis kembali melakukan wawancara dengan Bapak YK, sebagai berikut:

“Pengorganisasian TPID Kalteng ini mengacu pada Intruksi Kemendagri RI Nomor 027/1696/SJ. Untuk lebih jelasnya ada didalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/490/2017.”⁵⁷

Berdasarkan penuturan Bapak YK pengorganisasian TPID Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/490/2017, jadi Bapak YK hanya memberikan salinan Keputusan Gubernur tersebut yang selanjutnya penulis lampirkan pada lampiran 7.

Dari Keputusan Gubernur tersebut penulis mengetahui susunan keanggotaan TPID Provinsi Kalimantan Tengah dan uraian tugas TPID Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kajian teori di BAB II diuraikan bahwa dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing sehingga terintegritaskan hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif yang harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pengorganisasian yang dilakukan TPID Kalteng sejalan dengan teori tersebut, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/490/2017 secara terperinci memaparkan tugas, wewenang dan tanggung

⁵⁷Wawancara dengan Bapak YK, di Gedung Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 23 Mei 2018.

jawab setiap SOPD berdasarkan bidangnya masing-masing agar tujuan yang telah disepakati bersama bisa tercapai.

3. Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi

Pelaksanaan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. Para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervisi, dengan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok.⁵⁸

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015, pengendalian inflasi dilaksanakan terhadap tiga hal, yaitu:

a. Sisi produksi;

Pengendalian inflasi pada sisi produksi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Inisiasi dan/atau percontohan budidaya bagi komoditas penyumbang inflasi yang masih belum berkembang budidayanya di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Pengembangan budidaya bagi komoditas penyumbang inflasi pada saat-saat terjadi kekurangan pasokan sebagai penyangga terhadap kekurangan pasokan tersebut. Pengembangan budidaya bagi komoditas penyumbang

⁵⁸Anton Atoilah, *Dasar-Dasar Manajemen*, h. 116.

inflasi yang mengalami kekurangan pasokan pada saat tertentu sesuai hasil kajian wajib dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki tupoksi yang sama melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan. Pada saat-saat tertentu dimana terjadi kekurangan pasokan sesuai hasil kajian, maka TPID Provinsi wajib melaksanakan fasilitasi penyediaan komoditas-komoditas yang mengalami kekurangan pasokan tersebut melalui pasar penyeimbang baik yang tetap maupun yang bergerak. Penyediaan komoditas-komoditas yang mengalami kekurangan pasokan tersebut melalui pasar penyeimbang baik yang tetap maupun yang bergerak dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing menggunakan hasil pengembangan komoditas yang berfungsi sebagai penyangga dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga melalui skema lainnya. Pasar penyeimbang dibangun secara permanen dan dikelola secara profesional. Pengelolaan pasar penyeimbang berada dibawah koordinasi SKPD Provinsi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan; dan

3) Pemetaan surplus defisit komoditas pokok strategis penyumbang inflasi.

b. Sisi Distribusi

Pengendalian inflasi sisi distribusi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Pemantauan stok dan harga komoditas strategis serta analisisnya;
- 2) Pemberian informasi perkembangan stok dan harga terkini serta analisisnya kepada semua pemangku kepentingan;

- 3) Perbaiki distribusi berupa pemotongan (memperpendek) mata rantai pasokan; dan
- 4) Kerjasama dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain.

c. Sisi Ekspektasi Masyarakat

Pengelolaan ekspektasi masyarakat dilaksanakan dengan pemberian informasi secara transparan dan mudah. Pemberian informasi berisikan ketersediaan stok dan harga-harga bahan pokok strategis. Pemberian informasi diumumkan melalui berbagai media seperti *running text*, radio, TV, baleho, spanduk, koran, selebaran, mobil siaran keliling, website, dan media lainnya.⁵⁹

Selanjutnya penulis kembali melakukan wawancara dengan Bapak YK. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian inflasi di Kalteng, berikut penuturan Bapak YK:

“Kalau untuk pelaksanaannya ya kami melaksanakan sesuai RKPI dan RAPI yang sudah disusun. Pengendalian inflasi ini kan dilaksanakan terhadap 3 hal: sisi produksi, distribusi dan ekspektasi masyarakat. Jadi masing-masing SKPD melaksanakan sesuai RAPI yang sudah disusun berdasarkan hasil kajian dari 3 hal tersebut. Contohnya seperti Disperindag yang bertanggung jawab terhadap pasar penyeimbang itu kan melaksanakan pengendalian inflasi dari sisi produksi. Ada 3 program kerja yang dilaksanakan TPID Kalteng yang dipandang berhasil dan memiliki pengaruh untuk terjaganya stabilitas harga, ada pasar penyeimbang, kolam penyangga dan kandang penyangga. Kalau ingin tau tentang teknis pelaksanaannya dari 3 program itu silahkan langsung di tanyakan ke SKPD terkait.”⁶⁰

Dari penuturan Bapak YK penulis mengetahui bahwa pelaksanaan pengendalian inflasi di Kalteng sesuai dengan RKPI dan RAPI yang sudah

⁵⁹Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Inflasi, Pasal 27-32.

⁶⁰Wawancara dengan Bapak YK, di Gedung Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 23 Mei 2018.

disusun berdasarkan hasil kajian dengan mengacu pada mekanisme pengendalian inflasi yang sudah ditetapkan melalui Pergub, yaitu sisi produksi, sisi distribusi dan sisi ekspektasi masyarakat. Untuk melengkapi hasil penelitian maka penulis juga melakukan wawancara dan dokumentasi dengan 3 orang anggota TPID Provinsi Kalimantan Tengah dari SKPD terkait yang bertanggung jawab terhadap 3 program kerja yang disebutkan Bapak YK yaitu pasar penyeimbang, kolam penyangga dan kandang penyangga.

a. Pasar Penyeimbang

Tujuan diselenggarakannya pasar penyeimbang adalah untuk menjaga stabilitas harga komoditas-komoditas, baik pangan maupun non pangan yang berpotensi menyumbang inflasi pada momen-momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Sejalan dengan tujuan awal pembentukannya, PP dimaksudkan sebagai pasar alternatif yang memberikan harga standar (normal) dan diharapkan secara psikologis dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat. Melalui PP diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan stok barang dan komoditas akan tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam jumlah yang normal di PP. Selain itu, mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan melakukan spekulasi menimbun barang atau menaikkan harga di pasar.⁶¹

Pasar penyeimbang semula berlokasi di Jln AIS Nasution, depan SMP Negeri 1 Palangka Raya, saat ini berpindah ke lokasi yang lebih lebar tidak jauh dari lokasi PP yang lama yakni di depan SMAN 1 Palangka Raya,

⁶¹Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Pengendali Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Buku Panduan, h. 13.

PP ini menjual berbagai kebutuhan pokok strategis sesuai arahan hasil kajian Tim Ahli TPID, antara lain daging ayam ras, telur, beras, gula pasir, ikan-ikanan, minyak goreng, sayur-sayuran, cabai, bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Penyempurnaan pasar penyeimbang dilakukan dengan revitalisasi bangunan pasar penyeimbang menjadi semi permanen dari yang sebelumnya non permanen. Hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat untuk berbelanja di pasar penyeimbang untuk menjaga stabilitas harga komoditas-komoditas tertentu. Selain itu waktu operasional pasar penyeimbang juga telah disempurnakan dari yang sebelumnya hanya dioperasikan pada periode tertentu, saat ini pasar penyeimbang telah dioperasikan setiap hari. Hal tersebut juga dilakukan dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat terkait harga komoditas barang tertentu. Lokasi PP ini dipilih sedemikian rupa, berada diantara dua pasar tradisional Palangka Raya yakni Pasar Kahayan dan Pasar Besar. Harga komoditas yang dijual di PP sebagai pembanding apabila harga di ke 2 pasar tradisional mengalami kenaikan harga secara tidak wajar.⁶²

Kemudian untuk melengkapi hasil penelitian penulis melakukan wawancara dengan perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau yang bertanggung jawab terhadap pasar penyeimbang dengan inisial JT. Ibu JT adalah Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri yang juga merupakan Anggota TPID Provinsi Kalimantan Tengah. Wawancara

⁶²TPID Provinsi Kalimantan Tengah, Laporan Tahunan TPID Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017, h. 13.

dilakukan untuk mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan dari pasar penyeimbang, berikut penuturan Ibu JT:

“Jadi pasar penyeimbang itu didirikan atas kesepakatan orang-orang yang ada di Tim Pengendali Inflasi Kalteng. Pasar penyeimbang itu gunanya untuk mengendalikan harga, jadi apabila harga misalnya di pasar mahal di pasar penyeimbang itu harga nya sedikit lebih rendah dan lebih ringan di bandingkan dengan di pasar. Karena pengelolanya itu kan dari kami ada bantuan transport nya, jadi makanya harga barang disitu bisa lebih murah sedikit dengan dipasar. Adapun komoditas-komoditas yang ada di pasar penyeimbang sesuai dengan SOPD-SOPD masing-masing. Jadi kalo kami sudah ditentukan bertanggung jawab terhadap gula, kemudian kaya daging ayam ras itu dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, ikan-ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi disana itu semua orang bertanggung jawab masing-masing SOPD yang ada di Tim Pengendali Inflasi itu. Awalnya dulu kan pasar penyeimbang ini dibuka pada momen-momen tertentu saja, sekarang sudah dibuka setiap hari.”⁶³

Berdasarkan penuturan dari Ibu JT pelaksanaan pasar penyeimbang adalah untuk mengendalikan harga. Komoditas-komoditas yang di jual di pasar penyeimbang sesuai dengan SOPD-SOPD masing-masing. Ibu JT juga memberikan salinan Surat Perintah Tugas Kepada Anggota TPID Provinsi Kalimantan Tengah khususnya SKPD yang bertanggung jawab untuk penyedia komoditas pada pasar penyeimbang yang selanjutnya penulis lampirkan dalam skripsi ini.

Dari dokumentasi dan wawancara di atas penulis mengetahui bahwa pasar penyeimbang dibangun bertujuan untuk menjaga stabilitas harga komoditas-komoditas tertentu. Pasar penyeimbang sebelumnya hanya dioperasikan pada periode tertentu, saat ini pasar penyeimbang dioperasikan setiap hari. Yang bertanggung jawab terhadap komoditas-komoditas yang di

⁶³Wawancara dengan Ibu JT, di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah, 6 Juni 2018.

jual di pasar penyeimbang adalah sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Kandang Penyangga

Kandang penyangga daging ayam ras dibangun dan dioperasikan sejak tahun 2014 dan secara periodik dievaluasi efektifitasnya. Dari awal didirikannya kandang penyangga hingga tahun 2017 kandang penyangga telah memiliki kapasitas 25.000 ekor ayam. Tujuan diselenggarakannya kandang penyangga adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan daging ayam ras masyarakat, dengan keberadaan kandang penyangga diharapkan mampu meredam tekanan harga komoditas daging ayam ras pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan yang secara historis memberikan dampak peningkatan permintaan komoditas tersebut sehingga mendorong terjadinya inflasi. Hasil produksi kandang penyangga sebagian besar penjualannya dilakukan melalui pasar penyeimbang, hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan ekspektasi masyarakat serta pedagang dan semua stakeholders, sehingga para spekulan tidak akan berani menimbun barang atau menaikkan harga seenaknya. Dengan adanya kandang penyangga diharapkan dapat mengendalikan harga daging ayam ras di level yang wajar.⁶⁴

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan perwakilan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan

⁶⁴TPID Provinsi Kalimantan Tengah, Laporan Tahunan TPID Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017.

Tengah atau yang bertanggung jawab terhadap kandang penyangga dengan inisial FR. Bapak FR adalah Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang juga merupakan Anggota TPID Provinsi Kalimantan Tengah. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan dari kandang penyangga, berikut penuturan Bapak FR:

“Jadi teknis pelaksanaan kandang penyangga ini Pemprov Kalteng bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal budidaya ayam ras, dimana Pemda menyiapkan lahan dan kandang ayam, sedangkan bibit, pakan dan pemeliharaannya ditanggung oleh pihak ketiga dengan pola *sharring*. Nah, sampai saat ini ada lima unit kandang ayam milik Pemprov Kalteng melalui Dinas Peternakan yang berlokasi di Km 38 Jalan Palangka Raya-Kasongan dengan kapasitas masing-masing 5.000 ekor per kandang atau dengan total kapasitas sebanyak 25.000 ekor. Budidaya ayam ras ini diatur sedemikian rupa supaya panennya bertepatan dengan terjadinya permintaan pasar yang besar.”⁶⁵

Berdasarkan penuturan dari Bapak FR pelaksanaan kandang penyangga adalah dengan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang mana Pemerintah Daerah menyiapkan lahan dan kandang ayam, sedangkan bibit pakan dan pemeliharaannya ditanggung oleh pihak ketiga dengan pola *sharring*. Dengan kondisi tersebut maka biaya produksi stabil.

Berdasarkan dokumentasi dan wawancara diatas penulis mengetahui bahwa tujuan diselenggarakannya kandang penyangga adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan daging ayam ras, dengan keberadaan kandang penyangga diharapkan mampu meredam tekanan harga komoditas daging ayam ras pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan. Saat ini ada 5 unit kandang ayam dengan kapasitas 5.000 ekor per kandang.

⁶⁵Wawancara dengan Bapak FR, di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, 6 Juni 2018.

Kandang penyangga berlokasi di Km 38 Jalan Palangka Raya-Kasongan. Teknis pelaksanaan kandang penyangga adalah berkerjasama dengan pihak ketiga dimana Pemda menyiapkan lahan dan kandang ayam, sedangkan bibit, pakan dan pemeliharaannya ditanggung oleh pihak ketiga dengan pola *sharring*.

c. Kolam Penyangga

Kolam penyangga ikan nila dan ikan patin dibangun di daerah Tangkiling atau sekitar 25 km dari pusat Kota Palangka Raya dan dioperasikan sejak awal tahun 2017 dan secara periodik dievaluasi efektifitasnya. Pemanfaatan kolam penyangga ini adalah sepanjang tahun dengan menyesuaikan masa panen terhadap momen-momen hari besar keagamaan, serta sinergi antara produksi di kolam penyangga dengan pasar penyeimbang serta sesuai dengan pantauan harian harga-harga komoditas pangan strategis (ikan nila dan ikan patin) di dua Pasar Tradisional, yakni Pasar Besar dan Pasar Kahayan, dan disinkronkan dengan kalender penebaran bibit dan periode panen ikan.⁶⁶

Untuk melengkapi hasil penelitian penulis melakukan wawancara dengan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah atau yang bertanggung jawab terhadap kolam penyangga dengan inisial SI. Ibu SI adalah Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran yang juga merupakan Anggota TPID Provinsi Kalimantan Tengah. Wawancara

⁶⁶TPID Provinsi Kalimantan Tengah, Laporan Tahunan TPID Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017.

dilakukan untuk mengerahui bagaimana teknis pelaksanaan dari kolam penyangga, berikut penuturan Ibu SI:

“Sama hal nya seperti kandang penyangga, kolam penyangga ini dibangun untuk menjaga ketersediaan pasokan ikan nila dan ikan patin. Operasionalisasinya 20 buah kolam dengan kapasitas masing-masing menampung 10.000 ekor ikan. Pelaksanaannya ini bekerjasama dengan pihak ketiga, asosiasi peternak ikan nila dan ikan patin, serta pelaku usaha terkait penyediaan bibit dan pakan ikan.”⁶⁷

Berdasarkan penuturan Ibu SI, pelaksanaan kolam penyangga sama seperti hal nya kandang penyangga dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, asosiasi peternak ikan nila dan patin dan pelaku usaha bibit dan pakan ikan.

Berdasarkan dokumentasi dan wawancara diatas penulis mengetahui bahwa kolam penyangga ikan nila dan patin dibangun untuk menjaga pasokan komoditas tersebut. Saat ini operasionalisasi kolam penyangga ada 20 buah kolam dengan kapasitas masing-masing menampung 10.000 ekor ikan. Teknis pelaksanaan kolam penyangga adalah bekerjasama dengan pihak ketiga, asosiasi peternak ikan nila dan ikan patin, dan pelaku usaha terkait penyediaan bibit dan pakan ikan.

Seluruh rangkaian proses manajemen yang ada, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang

⁶⁷Wawancara dengan Ibu SI, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, 6 Juni 2018.

dalam organisasi. Dari uraian diatas diketahui bahwa TPID Kalteng sudah menjalankan fungsi pelaksanaan sebagaimana teori yang sudah di ungkapkan pada BAB II, hal ini dapat dilihat dari program-program yang sudah dijalankan dan terus dikembangkan oleh TPID Kalteng. Program-program tersebut terbukti dapat menjaga stabilitas harga, hanya saja kurang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih belum banyak mengetahui mengenai program-program tersebut khususnya pasar penyeimbang.

4. Pengendalian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi

Pengendalian (*controlling*) adalah meneliti dan mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personal.⁶⁸ Pengendalian dalam TPID Kalteng dilakukan dengan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan rencana aksi SKPD/Instansi dalam pengendalian inflasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan segera setelah rilis BPS dilaksanakan. Rapat monitoring dan evaluasi dipimpin oleh Ketua Tim Teknis dan diikuti oleh semua anggota Tim Teknis guna membahas hasil rilis BPS, informasi komoditas yang mengalami inflasi/deflasi pada bulan sebelumnya, latar belakang terjadinya inflasi/deflasi, serta informasi penting lainnya dalam pengendalian inflasi. Hasil rapat monitoring dan evaluasi digunakan sebagai acuan dalam melakukan *review* rencana aksi pada bulan berjalan.⁶⁹ Rapat

⁶⁸Anton Athoilah, *Dasar-Dasar Manajemen*, h. 113-114.

⁶⁹Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Inflasi, Pasal 33.

monitoring dan evaluasi tersebut biasa disebut rapat persiapan siaran pers dan rapat pelaksanaan siaran pers. Rapat persiapan siaran pers dilaksanakan dalam rangka pendahuluan sebelum rapat siaran pers dilaksanakan, rapat dipimpin oleh Tim Teknis yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan hasil rilis BPS. Rapat pelaksanaan siaran pers dilaksanakan dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat melalui media-pers tentang ketersediaan dan harga-harga bahan pokok strategis serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi, rapat pelaksanaan siaran pers dilaksanakan pada hari kerja yaitu satu hari setelah rilis.⁷⁰ TPID Provinsi wajib menyusun laporan pelaksanaan pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan terdiri dari laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan serta laporan lainnya sesuai arahan Tim Pengarah dan/atau Pokjanas TPI.⁷¹

Selanjutnya penulis kembali melakukan wawancara dengan Bapak YK. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengendalian dalam TPID Kalteng. Berikut penuturan Bapak YK:

“Pengendalian dalam TPID Kalteng ini dilakukan dengan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan dilakukannya rapat evaluasi setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Rapat evaluasi di adakan setiap awal bulan atau lebih tepatnya H+1 setelah rilis BPS tentang kondisi inflasi. Nah, dari hasil/laporan BPS tersebut, TPID melaksanakan rapat evaluasi dikaitkan dengan rilis BPS itu. Masing-masing SKPD terkait menjelaskan bagaimana keadaan komoditas-komoditas pemicu inflasi sesuai dengan rilis BPS. Contohnya jika dalam rilis BPS komoditas pemicu inflasi adalah daging ayam ras maka Dinas Peternakan akan menjelaskan kenapa bisa terjadi inflasi, bagaimana kondisi harga daging ayam ras di pasar, bagaimana keadaan kandang penyangga apakah bisa panen untuk mengendalikan harga di pasar.

⁷⁰Ibid, Pasal 18-20.

⁷¹Ibid, Pasal 34.

Nah, seperti itu. Hasil penjelasan tiap SKPD tersebut digunakan untuk mengevaluasi kegiatan TPID selama 1 bulan sebelumnya dan untuk menjustifikasi rencana kerja pada bulan berikutnya. Lalu, H+2 setelah rilis BPS atau setelah rapat evaluasi TPID mengadakan *Press Release* TPID untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang latar belakang terjadinya inflasi/deflasi dan bagaimana keadaan komoditas-komoditas bulan berikutnya. Kami juga melakukan pelaporan setiap bulan, semester dan tahun. Lapornya nanti bisa dilihat sama staf saya.”⁷²

Berdasarkan penuturan dari Bapak YK pengendalian yang dilakukan TPID Kalteng ini sesuai dengan Pergub yang ditetapkan. Untuk memperkuat hasil wawancara, Staf Bapak YK juga memperlihatkan laporan semester I tahun 2017 dan laporan tahunan tahun 2017. Selanjutnya penulis dokumentasikan dalam bentuk gambar dan penulis lampirkan dalam skripsi ini.

Hasil dokumentasi dan wawancara diatas penulis mengetahui bahwa pengendalian dalam TPID Kalteng dilakukan dengan monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah kegiatan memantau kinerja/efektivitas rencana aksi SKPD dalam rangka pengendalian inflasi yang di ukur dengan tingkat inflasi masing-masing komoditas pada periode tertentu. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara realisasi dan rencana tingkat inflasi baik tingkat komoditas maupun secara menyeluruh selama periode tertentu. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan dilakukannya rapat persiapan siaran pers dan rapat pelaksanaan siaran pers. TPID Kalteng juga menyusun laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan sesuai arahan Tim Pengarah.

Pengendalian yang dilakukan TPID Kalteng sejalan dengan fungsi pengendalian yang diuraikan pada kajian teori di BAB II, menurut Anton

⁷²Wawancara dengan Bapak YK, di Gedung Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 23 Mei 2018.

Athoillah dalam bukunya *Dasar-Dasar Manajemen* mengungkapkan bahwa pengendalian terdiri atas: penelitian terhadap hasil kerja sesuai dengan rencana/program kerja; pelaporan hasil kerja dan pendataan berbagai masalah; dan evaluasi hasil kerja dan penyelesaian atau pemecahan masalah. Setiap awal bulan setelah rilis BPS, TPID Kalteng mengadakan rapat untuk mengevaluasi hasil kerja sesuai dengan rencana/program kerja, dari evaluasi tersebut akan diketahui apakah rencana aksi yang ada sudah tepat atau perlu dilaksanakan revisi.

Manajemen kerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Agar manajemen pada sebuah organisasi bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka dapat menjalankannya dengan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Anton Athoillah dalam bukunya *Dasar-Dasar Manajemen*, fungsi-fungsi manajemen terbagi menjadi 4 yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, diketahui bahwa secara tidak langsung Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen. Apabila dikaitkan dengan kajian teori di BAB II, proses pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalteng sudah sejalan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Adapun hasil yang didapat dari manajemen pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalteng adalah terkendalinya tingkat inflasi Kalimantan Tengah

khususnya Kota Palangka Raya. Hal ini terlihat dari tingkat inflasi 5 tahun terakhir Kalimantan Tengah, Palangka Raya dan Nasional yang sudah penulis uraikan pada latar belakang di BAB I. Dari data tersebut diketahui bahwa tingkat inflasi Kalteng dan Palangka Raya selama 5 tahun terakhir cukup berfluktuasi dan mulai terkendali dengan baik. Terlihat dari tingkat inflasi Kalteng dan Palangka Raya tahun 2015-2017 sudah berada dibawah target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila dikaitkan lagi dengan data inflasi tahun 2018, tingkat inflasi dari bulan Januari-September 2018 juga berada dibawah target inflasi yang ditetapkan. Target/sasaran inflasi tahun 2018 yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah 3,5% dengan deviasi $\pm 1\%$. Berikut laju inflasi Kalimantan Tengah dan Palangka Raya Tahun ke Tahun dari bulan Januari-September Tahun 2018:

Tabel 4.1
Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya Bulan Januari-September 2018

Bulan	2018	
	Palangka Raya	Kalimantan Tengah
Januari	2,56	2,75
Februari	2,32	2,55
Maret	2,30	2,31
April	2,38	2,55
Mei	2,11	2,62
Juni	2,23	3,08
Juli	2,67	3,13
Agustus	2,42	3,47
September	2,69	3,72

Sumber: BPS Kalteng

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa manajemen pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalteng sudah cukup berhasil membuat angka inflasi di Palangka Raya dan Kalteng relatif terkendali dan stabil. Hal ini memberikan

sumbangan positif bagi inflasi nasional, dengan terkendalnya inflasi di suatu daerah maka angka kemiskinan dapat dikendalikan, daya beli masyarakat terjaga dan para investor akan berlomba-lomba untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Itu artinya manajemen pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalteng cukup efektif dengan kontribusi yang berhasil mereka capai sebagaimana tujuan dari TPID.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan dengan pedoman pengendalian inflasi yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015. Secara tidak langsung TPID Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen, karna proses pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalteng sudah sejalan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendlaian. Manajemen pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalteng sudah cukup berhasil membuat angka inflasi di Palangka Raya dan Kalimanta Tengah relatif terkendali dan stabil, itu berarti tujuan dari TPID Kalteng dalam mengendalikan inflasi sudah tercapai.

1. Perencanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya

Perencanaan pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Provinsi Kalteng didahului dengan kajian teknokratik, dari hasil kajian tersebut kemudian menyusun RKPI, RAPI-SKPD dan RAPI-TPID. Perencanaan pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalteng secara tidak langsung sudah menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, karena dari hal-hal yang dilakukan itu

merupakan keseluruhan proses yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

2. Pengorganisasian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya

Pengorganisasian TPID Kalteng mengacu pada Instruksi Kemendagri RI Nomor 027/1696/SJ. Susunan keanggotaan TPID Kalteng dan uraian tugas TPID Kalteng berdasarkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/490/2017. Pengorganisasian yang dilakukan TPID Kalteng sejalan dengan teori pengorganisasian pada BAB II, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/490/2017 secara terperinci memaparkan tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap SOPD berdasarkan bidangnya masing-masing agar tujuan yang telah disepakati bersama bisa tercapai.

3. Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya

Pelaksanaan pengendalian inflasi di Kalteng sesuai dengan RKPI dan RAPI yang sudah disusun berdasarkan hasil kajian dengan mengacu pada mekanisme pengendalian inflasi yang sudah ditetapkan melalui Pergub, yaitu sisi produksi, sisi distribusi dan sisi ekspektasi masyarakat dengan menjalankan 3 program kerja yaitu pasar penyeimbang, kandang penyangga dan kolam penyangga. TPID Kalteng sudah menjalankan fungsi pelaksanaan sebagaimana teori yang sudah di ungkapkan pada BAB II, hal ini dapat dilihat dari program-program yang sudah dijalankan dan terus dikembangkan oleh TPID Kalteng. Program-program tersebut terbukti dapat menjaga stabilitas harga, hanya saja kurang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih belum banyak mengetahui program-program tersebut khususnya pasar penyeimbang.

4. Pengendalian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya

Pengendalian dalam TPID Kalteng dilakukan dengan monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan rapat evaluasi setiap awal bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Rapat evaluasi di adakan setiap awal bulan atau lebih tepatnya H+1 setelah rilis BPS tentang kondisi inflasi, rapat tersebut biasa disebut dengan rapat persiapan siaran pers. Kemudian H+2 setelah rilis BPS atau setelah rapat evaluasi TPID mengadakan *Press Release* TPID untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang latar belakang terjadinya inflasi/deflasi dan bagaimana keadaan komoditas-komoditas bulan berikutnya, rapat tersebut biasa disebut dengan rapat pelaksanaan siaran pers. Pengendalian yang dilakukan TPID Kalteng sejalan dengan fungsi pengendalian yang diuraikan pada kajian teori di BAB II, TPID Kalteng mengadakan rapat untuk mengevaluasi hasil kerja sesuai dengan rencana/program kerja, dari evaluasi tersebut akan diketahui apakah rencana aksi yang ada sudah tepat atau perlu dilaksanakan revisi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindak lanjuti. Adapun yang penulis sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi TPID Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat melakukan pembinaan terhadap TPID Kabupaten/Kota dalam pengendalian inflasi, sehingga

pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan oleh TPID Provinsi tetapi juga TPID Kab/Kota agar inflasi Kalimantan Tengah yang stabil dan terkendali dapat terus terwujud.

2. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar terus mensosialisasikan Pasar Penyeimbang, sehingga masyarakat Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya lebih mengetahui dan tertarik berbelanja di Pasar Penyeimbang.
3. Bagi peneliti berikutnya hendaknya penelitian yang dipaparkan oleh peneliti dapat dikritisi demi peningkatan ilmu pengetahuan terutama kaitannya dengan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, M. Nur Rianto Al, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Athoillah, Anton, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cetakan Kesatu, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Usman, *Asas Manajemen*, Cetakan Kesatu, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Firdaus, Rachmat, dan Ariyanti, Maya, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Karya, Detri dan Syamsuddin, Syamri, *Makroekonomi: Pengantar Untuk Manajemen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Univertas Indonesia Press, 1999.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua Puluh, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua Puluh Tiga, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasution, S., *Metode Research*, Jakarta: Bina Aksara, 1996.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedelapan, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suprayogo, Imam, dan Tobrani, *Metode Penelitian Sosial – Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, *Tim Pengendali Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Buku Panduan*, t.dt.

Zakaria, Junaiddin, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Edisi 1, Jakarta: Gaung Persada, 2013.

B. Skripsi

Mamik Wahjuanto, “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Laju Inflasi di Indonesia”, *Skripsi*.

Rahma Fazri Aldila, “Dampak Inflasi Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kota Tasikmalaya”, *Skripsi*.

Surya Dharma, “Analisis Peranan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terhadap Pengendalian Inflasi (Studi Kasus: Provinsi Sumatera Utara)”, *Skripsi*.

Yuli Ariadi, “Praktik-praktik Manajemen Kinerja pada Organisasi Sektor Publik dan Hubungannya dengan Kinerja Organisasi (Studi pada Satuan Kerja Pengelola Dana APBN di Indonesia)”, *Skripsi*.

C. Internet

Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/moneter/kerangka-kebijakan/Contents/Default.aspx> (online 13 Februari 2018).

Penetapan Target Inflasi, <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/bi-dan-inflasi/Contents/Penetapan.aspx> (online 13 Februari 2018).

Pengendalian Inflasi, <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/bi-dan-inflasi/Contents/Pengendalian.aspx> (online 13 Februari 2018).

TPID Kalteng Terbaik se Indonesia Timur, <http://kalteng.prokal.co/read/news/7190-tpid-kalteng-terbaik-se-indonesia-timur> (online 14 Juni 2017).

Mujib Ridwan, Pengertian Kerja Menurut Para Ahli, <http://walangkopo99.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-kerja-menurut-para-ahli.html> (online 29 Maret 2018).

Wapres Serahkan Piala Kepada Top 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/3252-wapres-serahkan-piala-kepada-top-25-inovasi-pelayanan-publik-2015> (online 14 Juni 2017).

